

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang luas dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia diperkirakan berjumlah 17.000 lebih yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki luas wilayah mencapai 1.919.440 KM². Awalnya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, tetapi seiring berjalannya waktu sistem tersebut tidak lagi efektif untuk dijalankan pada pemerintahan Indonesia karena terdapat banyak keputusan yang tidak berjalan baik atau tidak terimplementasi secara baik pada masing-masing daerah. Dengan wilayah negara yang sedemikian luas tersebut, Indonesia tidak dapat menganut sistem sentralisasi lagi karena dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi tiap-tiap daerah.

Indonesia mulai menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah otonom yang memiliki kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas daerah itu sendiri. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009).

Terlaksananya otonomi daerah berarti memberikan kewenangan bagi daerah untuk mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri tetapi terdapat beberapa bidang yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat yaitu agama, peradilan, pertahanan, keamanan, politik luar negeri dan dalam negeri.

Otonomi Daerah di Indonesia sudah mulai dibicarakan sejak era reformasi setelah runtuhnya tembok pemerintahan Orde Baru. Otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ini melalui UU Nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintah daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dari Undang-undang sebelumnya, kemudian mengalami beberapa kali perubahan setelahnya karena dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan ketatanegaraan pada saat itu, lalu dilakukan amandemen dan pada tanggal 15 oktober 2004 ditetapkanlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Terakhir UU Nomor 22 Tahun 1999 mengalami 2 kali perubahan yaitu pertama UU Nomor 23 Tahun 2014 dan kedua UU Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari perubahan yang pertama.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pada pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari bagaimana kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah yang menjadi faktor utama dalam mengukur keberhasilan pencapaian pemerintah daerah adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah dan perhitungan APBD.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor utama yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, belanja modal dan ukuran Pemerintah. Faktor pertama

yaitu kekayaan daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah.

Faktor kedua yaitu tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sejak diimplementasikannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang menyerahkan kewenangan penuh bagi daerah dan memberikan dampak yaitu konsekuensi terhadap pembiayaan. Diperlukan adanya bantuan dana dari pusat yang disebut dengan dana perimbangan yang akan diserahkan kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal.

Faktor ketiga yaitu belanja modal, belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sudarsan,2013). Semakin besar belanja modal terhadap total belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya yang dapat terlihat dari pembangunan sarana dan insfrastruktur didaerah tersebut yang nantinya akan meningkatkan produktivitas pada daerah tersebut. Faktor keempat

adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah yang besar yang dimiliki suatu daerah maka akan menimbulkan tuntutan dari masyarakat akan akuntabilitas kinerja suatu daerah tersebut semakin besar juga.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Alvini (2018) mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi pada Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Periode 2011-2016). Hasil pada penelitian tersebut adalah besarnya pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan tingkat ketergantungan daerah dan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2018) mengenai “Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana alokasi umum dan belanja modal secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kekayaan daerah yang dapat hitung dengan pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan daerah

kepada pemerintah pusat yang dapat dihitung dengan dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian dalam studi akuntansi khususnya bidang akuntansi Pemerintahan terkait pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Sebagai sumbangan referensi dan sumbangan informasi komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kajian kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

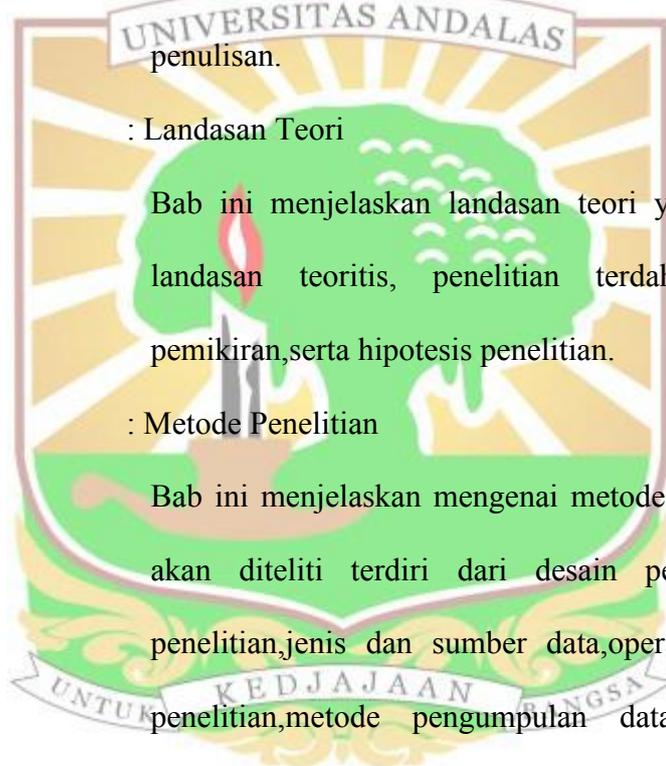
Bab ini menjelaskan landasan teori yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan diteliti terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data,

Bab IV : Hasil dan Penutup

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi dari penelitian ini.

